



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan.
- b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembar Negara 2010 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2023 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tat

Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2023 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG TAHUN 2026

- KESATU : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ismael Manoe	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Zunaidin Harun	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Julianus J. P. Nomleni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Florianus Hartono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Siti F. Arman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris KPU Kota Kupang	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Habel J. Manafe	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
2	Chornelia E. P. Boeky	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

4	Sutrisni	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Weli A. Ndoen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Luciana Bokotei	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Rizcky S. Mbura	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Jefri O. Benu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Abdurrahman	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
2	Litvina Ikun Pareira	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
3	Maria G. Rero	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Weli A. Ndoen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

5	Benyamin Afi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Juan Gilbert Sagala	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	Jefri A. Nggili	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Riczky S. Mbura	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Jefri O. Benu	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Benedikta G. K. Atie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Siti Maryam	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Chornelia E. P. Boeky	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Rosiana Wabang	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

5	Sutrisni	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6	Lucyana Bokotei	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Yabes Sioh	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Hironimus Narakaha	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
9	Korano Putra F. Dadi	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
10	Lucky R. Liu	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Habel J. Manafe	Kepala Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
2	Maria G. Rero	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
3	Litvina Ikun Pareira	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Mami Y. M. Tamen	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

5	Benyamin Afi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Lucky R. Liu	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
10	Riczky S. Mbura	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
11	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Sri Mulyawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

2	Rosiana Wabang	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3	Siti Maryam	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Edwin Muskananfolo	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Benyamin Afi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
8	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10	Hironimus Narakaha	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VI	PENGAWASAN			
1	Abdurraman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

2	Litvina Ikun Pareira	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting;
3	Sutrisni	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
5	Mami Y. M. Tamen	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
6	Edmin Muskananfolla	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
7	Juan Gilbert Sagala	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	Jefri A. Nggili	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Jefri O. Benu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Benedikta G. K. Atie	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	Siti Maryam	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

3	Rosiana Wabang	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Chornelia E. P. Boeky	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	Lucyana Bokotei	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	Yabes Sioh	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
8	Hironimus Narakaha	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	Jefri A. Nggili	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
10	Korano Putra F. Dadi	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Sri Mulyawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2	Maria A. Sali	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

3	Maria G. Rero	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Weli A. Ndoen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Syarahwati Zailani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
6	Mamy Y. M. Tamen	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	
7	Edwin Muskananfol	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8	Jaun Gilbert Sagala	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Jimmy N.A. Ratoe	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10	Ridwan Edi Seran	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11	Yabes Sioh	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
12	Melianus Nenogasu	Pelaksana pada Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Anggota	

IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris KPU Kota Kupang	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Benedikta G. K. Atie	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3	Habel J. Manafe	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4	Abdulrahman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Sri Mulyawati	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3.b. Jumlah Pelanggaran tahun ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3.c. Jumlah pelanggaran yang diberikan sanksi/hukuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4	Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK)	√										√	
				5	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi			√						√			
					5.b. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi												
			6	Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap jabatan sudah memiliki standar Kompetensi Jabatan				√						√		
			7	Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kota Kupang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2	Profesionalisme ASN	1	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	1	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√			√	√					
6	Penguatan Akuntabilitas	1	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Penyusunan dan Penetapan Renstra serta reviu Renstra	1	Renstra KPU Kota Kupang	√									
				2	Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	2.a.	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√									
						2.b.	% Capaian Kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward and Punishment</i>	√				√				√	
						2.c.	Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	√									
				3	Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1	Adanya program dan Kegiatan: 1). Jumlah Program 2). Jumlah Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Persentase Sasaran Kinerja: 1). Jumlah Sasaran Kinerja 2). Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	√		√			√			√	
						2	Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1). Jumlah anggaran total	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				4	Pemanfaatan Aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				5	Pengukuran Capaian Kinerja		% Capaian Kinerja			√			√			√	
				6	Evaluasi Capaian Kinerja		6.a. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kota Kupang 6.b. Reviu Lakip KPU Kota Kupang			√			√			√	
				7	Pelaporan Kinerja		Pelaporan Laporan Kinerja KPU Kota Kupang tepat waktu										√
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1	1. Terisinya aplikasi E-Lapkin 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir			√			√			√	
			2	Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	2	2.a. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan				√						√	

[illegible]

[illegible]

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan [Prasyarat layanan, Sistem Mekanisme Prosedur, Produk Layanan, Jangka waktu penyelesaian dan Biaya/tarif] 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan Publik 4. Sarana Prasarana dan Fasilitas 5. Pelayanan Khusus [Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan kebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus dll), Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan kebutuhan khusus] 6. Pengelolaan Pengaduan [Ketersediaan sarana pengaduan, Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan, Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan] 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survey pelayanan 8. Ksediaan Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 9. Atribut Pelayanan berupa kartu identitas petugas, kartu tamu, Buku Tamu dan Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu	3.b. Tersedianya maklumat pelayanan 3.c. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik 3.d. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 3.e. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana layanan 3.f. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 3.g. Tersedianya survey dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengelolaan 3.h. Tersedianya visi misi dan moto pelayanan 3.i. Atribut layanan dapat terlihat publik 3.j. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4	Penerapan partisipasi publik dalam layanan publik	1	Pembangunan Kerja Sama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1	Pembangunan dan pelaksanaan reward and punishment dalam pelayanan internal dan eksternal					√						√	



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
Kasubag Teknik Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
ABDURRAHMAN

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 10 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE